



Urgensi Sosialisasi Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda pada Pemilu 2024

Tumpal George¹⁾, Ratnia Solihah²⁾

Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

tumpal21001@mail.unpad.ac.id¹⁾

ratnia@unpad.ac.id²⁾

Abstrak

Komisi Pemilihan Umum memegang peran krusial dalam setiap tahapan pemilihan umum, terutama terkait sosialisasi politik, yang menjadi fokus utama dalam menjelang pemilihan presiden 2024. Pemilih muda, khususnya yang berusia 17 hingga 40 tahun, mendominasi pemilihan presiden, mencapai 55 persen dari total pemilih. Dalam konteks ini, KPU harus melakukan sosialisasi politik yang progresif untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih muda. Sosialisasi mencakup pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu, karakter calon presiden, prosedur pemilihan, hingga informasi terkait tanggal pelaksanaan dan partai politik yang terlibat. Dalam era digital, KPU perlu memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi melalui berbagai platform. Kerjasama dengan media, baik lokal maupun nasional, menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan sosialisasi. Mendominasinya golongan pemilih muda dan tingginya tingkat golput pada pemilihan sebelumnya menjadi tantangan bagi KPU. Evaluasi terhadap program Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang telah dilaksanakan perlu dilakukan, sambil memperkuat upaya sosialisasi melalui berbagai media dan kolaborasi dengan sekolah-sekolah serta universitas. KPU harus memastikan bahwa pesan-pesan sosialisasi dapat diterima dengan baik oleh pemilih muda, memanfaatkan berbagai media dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyebarkan informasi secara efektif dan menyeluruh.

Kata kunci: Sosialisasi Politik, Pemilih Muda, Pemilihan Presiden

Abstract

The General Election Commission (KPU) plays a crucial role in every stage of general elections, with a focus on political socialization, especially leading up to the 2024 elections. Young voters, particularly those aged 17 to 40, dominate the presidential election, comprising 55 percent of the total electorate. In this context, the KPU must conduct progressive political socialization to enhance the active participation of young voters. Socialization includes understanding the importance of participating in elections, the character of presidential candidates, voting procedures, and information related to election dates and participating political parties. In the digital era, the KPU needs to leverage technology to disseminate information through various platforms. Collaboration with media, both local and national, is key to achieving successful socialization. The dominance of young voters and the high level of voter abstention in previous elections pose challenges for the KPU. Evaluation of the Smart Election House (RPP) program needs to be conducted, while strengthening socialization efforts through various media and collaboration with schools and universities. The KPU must ensure that socialization messages are well-received by young voters, utilizing various media and collaborations with multiple stakeholders to effectively and comprehensively disseminate information.

Key words: Political Socialization, Presidential Election, Young Voters



PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu indikator sekaligus pilar utama bagi suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu yang berlangsung secara demokratis menjadi hal yang sangat penting dan krusial untuk menjaga kebebasan hak politik dan memastikan bahwa terdapat partisipasi aktif dari warga negara dalam menentukan arah roda pemerintahan. Pemerintahan yang dihasilkan dari pelaksanaan Pemilu diharapkan menjadi suatu pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dari setiap Masyarakat di dalamnya. Pemilu pun tidak hanya menghasilkan suatu pemerintahan yang terlegitimasi saja, tetapi juga menjadi tonggak tegaknya demokrasi di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara selama satu periode pemerintahan ke depan.

Keberhasilan pemilu sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi politik dari setiap komponen masyarakat yang bersangkutan, khususnya pada pemilih muda. Tingkat partisipasi politik tersebut dapat tergambar dari seberapa besar keterlibatan dan peran masyarakat dalam proses pemilu, yang mana hal tersebut juga dapat ditunjang dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dapat memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan. Belum maksimalnya Tingkat partisipasi politik pemilih tecermin dari persentase golput yang terjadi pada pemilihan presiden periode sebelumnya. Pada Pilpres 2019 lalu, dilansir dalam laman BBC News Indonesia yang menyatakan bahwa masih terdapat 19,24% pemilih yang golput dan tidak menggunakan hak suara mereka.

Kemudian, pada era digital yang terus berkembang seperti saat ini, banyak dari pemilih muda yang dihadapkan pada banyaknya tantangan baru dalam menjaga integritas pemilihan umum. Salah satu tantangan utamanya adalah minimnya informasi kepemiluan, khususnya dalam pemilihan presiden yang sedang berlangsung. Lebih dari itu, kerap kali terjadi fenomena penyebaran berita hoax dan disinformasi politik tentang kepemiluan yang nantinya bisa saja dapat memengaruhi opini publik dan menjadi suatu ancaman terhadap keberlangsungan pemilu yang adil.

Dwira Kharisma, dalam tulisannya yang berjudul Peran Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda, menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik pemilih muda saat pemilu. Dengan pendidikan politik dapat meningkatkan pengetahuan tentang dinamika politik yang berkembang. Dalam tulisan tersebut, beliau menekankan peran keluarga, peran lingkungan tempat beraktivitas, dan peran lingkungan pergaulan dalam memengaruhi proses sosialisasi politik bagi pemilih muda.

Di sisi lain, tulisan ini menekankan bagaimana pentingnya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan sosialisasi politik terhadap pemilih muda sebagai upaya peningkatan partisipasi politik para pemilih muda itu sendiri terhadap Pilpres 2024 mendatang. Peran Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan sosialisasi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena pada pemilihan presiden tahun 2024 nanti didominasi oleh kalangan pemilih muda. Tingginya tingkat pemilih muda, yang melebihi setengah dari total pemilih atau sebesar 55 persen, menjadi tanggung jawab penting bagi KPU dalam memberikan sosialisasi mengenai kepemiluan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran penting dan krusial terhadap urgensi sosialisasi perihal kepemiluan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2024 mendatang. Kemudian, diperlukan pula upaya yang sistematis oleh Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan model sosialisasi yang tepat dan efektif kepada pemilih muda di Indonesia sehingga dapat menciptakan pemilihan umum (Pemilu) yang berlangsung secara demokratis. Sosialisasi perihal kepemiluan pun dirasa perlu dilakukan secara massif terhadap seluruh komponen pemilih, khususnya pada kalangan pemilih muda yang bahkan berada di lingkungan pedalaman sekalipun. Hal tersebut menjadi penting karena sampai saat ini pun dalam kurun waktu menghitung hari pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih banyak pemilih muda yang bahkan tidak mengetahui kapan pelaksanaan Pemilu diadakan, dan berbagai hal lainnya mengenai kepemiluan yang sebentar lagi akan diadakan.

METODE

Dalam menyusun tulisan ini digunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Penulis memanfaatkan berbagai literatur sebagai sumber referensi dalam penulisan ini dan melakukan studi dokumentasi terkait dengan urgensi sosialisasi politik oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap pemilih muda dalam pemilihan presiden tahun 2024. Studi literatur sendiri merupakan serangkaian proses yang berhubungan dengan pengumpulan data sekunder, di mana penulis membaca, mencatat, dan mengolah



literatur tersebut yang memiliki keterkaitan dengan judul penulisan dan dapat mendukung penulisan jurnal ini. Selain itu, untuk memudahkan dalam penulisan jurnal, penulis juga menggunakan metode analisis isi yang berfokus pada membaca dan mencermati isi dari sumber yang akan dijadikan sebagai bahan rujukan oleh penulis yang kemudian dapat memberikan kemudahan bagi penulis untuk menuangkan ide atau gagasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran yang penting dalam setiap rangkaian pemilihan umum, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, bahkan hingga tahapan setelah pelaksanaan Pemilu. Dalam melakukan penyelenggaraan pemilu, KPU memiliki tugas dalam melakukan sosialisasi politik. Sosialisasi yang dilakukan tersebut harus dilakukan sebagai bentuk pemberian pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya kepada para pemilih muda yang diklasifikasikan berusia 17 hingga 40 tahun pada pelaksanaan pemilihan presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Sosialisasi mengenai kepemiluan terhadap pemilih muda sangat penting dilakukan karena pada pemilihan presiden dalam Pemilu 2024 didominasi oleh kalangan pemilih muda, termasuk pemilih yang baru memasuki usia pemilih dan pertama kali memiliki hak suara. Kondisi tersebutlah yang pada akhirnya membuat kondisi di mana para pemilih muda menjadi berperan penting dan strategis dalam keberlangsungan Pemilu.

Partisipasi aktif dari para pemilih muda tentu diharapkan untuk mampu ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut sehingga dapat menghasilkan pemimpin dan roda pemerintahan yang baru selama satu periode ke depan. Sosialisasi politik perihal kepemiluan juga perlu diberikan dengan pemberian pemahaman kepada pemilih muda bahwa satu suara yang diberikan oleh setiap mereka sangat berharga untuk menentukan kemajuan bangsa Indonesia selama lima tahun mendatang. Oleh karena itu, partisipasi politik dari setiap pemilih muda dalam hal ini sangat dibutuhkan baik bersifat langsung maupun tidak langsung.

Dalam mendorong minat serta keterlibatan politik masyarakat pada proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang tinggal menghitung hari, khususnya minat para pemilih muda, dibutuhkan sosialisasi politik dan pendidikan politik yang harus dilakukan secara masif dan strategis. Untuk meningkatkan partisipasi politik terhadap pemilih muda yang belum bisa mencapai angka maksimum, sosialisasi politik kepada mereka sangat penting untuk dimasifkan agar tercipta kondisi masyarakat yang melek politik (Herman et al., 2021). Dengan dilakukannya sosialisasi politik secara progresif oleh Komisi Pemilihan Umum mengenai informasi kepemiluan maka dapat memenuhi rasa ingin tahu para pemilih muda terhadap berbagai informasi dan isu politik yang berkembang dan ramai diperbincangkan publik, khususnya terhadap proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 yang tengah berlangsung.

Dalam sosialisasi politik tersebut, Komisi Pemilihan Umum harus mampu melakukan penyampaian terkait bagaimana pentingnya untuk turut berpartisipasi dalam Pilpres, karakteristik calon presiden yang baik dalam memimpin, prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan pemilihan, dan bagaimana KPU menyusun daftar pemilih. Lebih dari itu, KPU juga harus menyosialisasikan tanggal pelaksanaan pemilihan presiden, partai politik apa saja yang terlibat dalam pemilihan, bahkan hingga sosialisasi tentang jenis-jenis surat suara yang nantinya akan dicoblos pada saat hari pemilihan,

August Mellaz, Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, dalam diskusinya yang bertemakan "Pentingnya Pemilih Pemula dan Pemilih Muda Mengenal Bentuk dan Jenis Pelanggaran Pemilu" yang telah diselenggarakan pada Jumat, 10 Februari 2023 lalu mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2024 nanti didominasi oleh para pemilih muda. Proporsi pemilih muda pada pemilihan presiden tanggal 14 Februari 2024 mendatang bahkan mencapai 55 persen atau sebanyak 109 juta pemilih muda dari total seluruh pemilih. Mendominasinya pemilih muda pada Pemilu 2024, melalui pernyataan tersebut sudah sewajarnya menjadi tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada mereka. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara harus mampu melaksanakan tugasnya dalam menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No.7 Tahun 2017.

Selain mendominasinya pemilih muda dalam Pilpres 2024 mendatang, tercatat pula pada laman BBC News yang menyatakan bahwa pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 lalu, berdasarkan pada hasil hitung cepat LSI tercatat sebanyak 19,24% dari total pemilih yang masih golput terhadap hak suara mereka pada Pemilu 2019. Hal ini yang juga sepatutnya menjadi tugas bagi Komisi Pemilihan Umum untuk lebih meminimalisasi tingkat golput pada pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang, seiring dengan peningkatan jumlah pemilih di Indonesia.



Dalam era digitalisasi seperti sekarang ini, KPU harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk kepentingan sosialisasi. Penyebaran informasi ke pemilu harus dilakukan secara masif baik secara langsung atau konservatif maupun melalui berbagai platform digital yang ada. Komisi Pemilihan Umum dalam upaya menyosialisasikan informasi ke pemilu harus mampu membuat berbagai konten terkait ke pemilu yang persuasif sehingga para pemilih muda dapat lebih *aware* dan melek terhadap politik, khususnya pada pemilihan presiden tahun 2024. Dalam konten ke pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum perlu untuk membuat konten dengan visual yang tidak terkesan jadul sehingga mereka yang notabene sebagai pemilih muda akan lebih tertarik untuk membaca ataupun mendengarkan konten yang disajikan.

Kemudian, KPU harus mampu menjalin kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak media baik media lokal di setiap kabupaten/kota ataupun media dalam lingkup nasional. Dalam menghadapi Pemilu 2024, sinergi antara KPU dan media memiliki dampak yang begitu luar biasa terhadap keberhasilan proses pemilu yang demokratis. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini, mempengaruhi persepsi, dan membawa informasi ke berbagai lapisan masyarakat. Dalam konteks pemilu, peran media menjadi semakin penting karena mereka berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan masyarakat sebagai pemilih.

Melalui berbagai platform seperti televisi, radio, surat kabar, dan media sosial maka media harus mampu memberikan informasi terkini seputar pemilu, calon-calon presiden dan wakil presiden, tahapan pemilu, serta berbagai informasi seputar proses pemilihan itu sendiri. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak media untuk memastikan penyajian informasi ke pemilu yang akurat serta berbagai pengetahuan politik yang pada akhirnya dapat memberikan wawasan serta mampu memotivasi partisipasi aktif dari setiap pemilih muda. Begitupun sebaliknya, media juga harus mengutamakan integritas dan etika jurnalistik untuk mendukung proses pemilu yang bersih dan demokratis.

Permasalahan ke pemilu yang terjadi dari pemilu periode ke periode adalah masih tingginya persentase pemilih yang golput. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum, khususnya partisipasi para pemilih muda dalam pemilihan presiden (Pilpres), menjadi masalah utama sekaligus menjadi tugas penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Pada pemilu tahun 2019 lalu, tercatat bahwa jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya kurang lebih sekitar 34 juta orang atau dengan kata lain dalam persentase 18,02% pemilih golput dari total daftar pemilih tetap (DPT). Dari catatan tersebut membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang bahkan belum memahami betapa pentingnya memberikan hak suara mereka pada saat pelaksanaan pemilihan. Hal tersebut justru diperlukan agar suara-suara yang tidak terdengar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula.

Dalam permasalahan tersebut, bukanlah hanya tugas KPU RI saja melainkan juga menjadi tugas bagi KPU Daerah hingga ke tingkat kota/kabupaten. Diperlukan adanya koordinasi yang kuat dari KPU sebagai instansi yang menyelenggarakan pemilu kepada seluruh *stakeholder* hingga ke tingkat desa sekalipun. Tidak hanya itu, sikap konservatif dari berbagai masyarakat pun turut menjadi tantangan yang seharusnya dapat diselesaikan dan diatasi oleh KPU. Tidak sedikit dari para pemilih muda yang bahkan merasa bahwa suara mereka tidak begitu penting. Hal tersebut dikatakan demikian karena sebagian dari kalangan pemilih muda merasa bahwa mereka tidak akan begitu merasakan langsung dampak positif atas pemimpin yang nantinya akan terpilih. Oleh sebab itu, penting diadakannya sosialisasi dan penyuluhan bagi para pemilih muda yang masih bersifat konservatif atas perspektif demikian.

Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan sosialisasi sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengadakan rumah pintar pemilu (RPP). RPP sendiri merupakan kegiatan dengan konsep pendidikan politik kepada para pemilih untuk memberikan edukasi, melaksanakan berbagai program sosialisasi, dan aktivitas yang berkaitan dengan pemilihan umum. Pada dasarnya, program Rumah Pintar Pemilu ini difungsikan sebagaimana museum untuk mengenalkan sejarah dan perkembangan Pemilu dari tahun ke tahun, baik pada tingkat nasional maupun di daerah. Program RPP oleh KPU dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti publikasi kegiatan yang mana dalam hal ini KPU melakukan publikasi melalui Rumah Pintar Pemilu yang dilakukan melalui media cetak dan elektronik, media sosial maupun media luar ruang. Kemudian, KPU melakukan invitasi publik di mana berbagai elemen masyarakat diundang untuk ikut serta dalam program RPP ini untuk kepentingan tertentu terutama dalam hal pemilu dan demokrasi.

Program RPP yang dibentuk oleh KPU sendiri memiliki sejumlah kegiatan yang telah dicanangkan setiap tahunnya untuk menarik pengunjung dengan memanfaatkan momentum atau hari peringatan



tertentu. Oleh karena itu, KPU telah membuat kalender kegiatan yang sudah mengatur berbagai macam rangkaian aktivitas yang akan dilakukan pada program RPP tersebut. Selain dibentuk dengan tujuan menjadi media pendidikan dan informasi kepemiluan, Rumah Pintar Pemilu juga ditujukan untuk dapat menjadi wadah bagi komunitas peduli pemilu demi melangsungkan diskusi terkait berbagai isu kepemiluan dan demokrasi.

Pada kenyataannya, sejak dirikan rumah pintar pemilu ini pada tahun 2015 sampai sekarang masih banyak ditemukan rumah pintar pemilu di berbagai daerah yang masih sepi pengunjung. Walaupun memang ada sebagian dari pemilih, khususnya para pemilih muda, yang berkunjung dari lembaga sekolah dan masyarakat yang berkunjung ke KPU sendiri. Pemilih muda yang datang secara individu dan memang memiliki niat utama untuk berkunjung ke rumah pintar pemilu ini sangat minim ditemukan. Hal tersebut dapat terlihat dari sedikitnya pemilih muda yang datang atas ketertarikan dan penasaran dengan rumah pintar pemilu ini. Dalam hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih banyak pemilih muda yang memang belum tersampaikan informasi mengenai program RPP ini. Oleh sebab itu, KPU sudah seharusnya lebih menggiatkan kegiatan sosialisasi perihal RPP kepada setiap pemilih muda bahkan hingga ke tingkat daerah.

Pada program RPP yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, KPU sudah seharusnya melakukan evaluasi atas pelaksanaan program RPP pada periode sebelumnya. KPU dapat melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai *platform* atau siaran radio. Kemudian, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu sekaligus sebagai pencetus program RPP ini dapat melakukan pembagian selebaran brosur yang berisikan informasi tentang rumah pintar pemilu kepada para pemilih muda. Pembagian brosur tersebut dapat dilakukan seperti halnya membagikan di jalan raya ataupun di berbagai tempat yang memang ramai kerumunan. KPU juga dapat memanfaatkan momentum seperti halnya tempat-tempat hiburan keluarga atau tempat rekreasi yang banyak pengunjung.

KPU dapat melakukan sosialisasi perihal RPP kepada para pemilih muda yang sedang berada di tempat-tempat wisata yang ramai pengunjung, seperti di taman rekreasi, kebun binatang, bahkan hingga wisata kolam renang sekalipun. Dalam sosialisasi RPP, KPU juga dapat memanfaatkan berbagai laman resmi KPU baik pada laman KPU RI maupun hingga ke laman setiap KPU Daerah di tingkat kota/kabupaten. KPU dapat menggiatkan publikasi perihal RPP melalui laman resmi yang mereka punya untuk menginformasikan kepada pemilih muda mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU dari program RPP itu sendiri. Hal tersebut patut dilakukan agar para pemilih muda dapat melihat dan mengerti informasi yang disuguhkan oleh KPU mengenai pemilu dan pendidikan politik.

Kemudian, setiap KPU Daerah dapat memfasilitasi setiap tempat yang dijadikan sebagai RPP dengan petugas yang ditunjuk secara khusus dan mampu memberikan penjelasan atau pemahaman kepada setiap pengunjung yang datang ke rumah pintar pemilu. Hal tersebut dirasa perlu karena pada kenyataannya banyak tempat rumah pintar pemilu (RPP) yang tidak memiliki petugas yang secara khusus ditunjuk untuk menjelaskan mengenai rumah pintar pemilu ini kepada pengunjung sehingga dapat dikatakan bahwa sejauh ini belum banyak petugas yang mampu menjelaskan secara detail mengenai RPP. Sehingga tidak banyak informasi yang didapatkan oleh pengunjung rumah pintar pemilu ini.

Disamping program RPP, KPU juga dapat lebih giat menjalin kerja sama sekolah-sekolah dan melakukan sosialisasi kepada para siswa yang sudah memasuki usia pemilih atau dalam kata lain siswa yang dikatakan sebagai pemilih muda. Murid-murid SMA yang sudah berumur 17 tahun pun yang notabenehnya telah memasuki usia pemilih muda penting untuk diberikan sosialisasi dan pendidikan politik mengenai pemilu. Hal tersebut menjadi penting agar pada saat pelaksanaan nanti mereka sudah dapat dengan bijak memberikan hak suara mereka atas pilihannya. KPU dapat melakukan sosialisasi di berbagai sekolah menengah, khususnya di auditorium ataupun di aula sekolah yang mampu mewadahi para siswa yang sudah memasuki usia pemilih sehingga informasi kepemiluan dapat tersampaikan dengan baik.

Dalam sosialisasi ke sekolah-sekolah tersebut, setiap KPU Daerah atau bahkan KPU RI harus mampu melakukan sosialisasi dengan maksimal dan efektif. Perlu disampaikan pula dalam sosialisasi tersebut terkait tanggal pelaksanaan pemilu, jenis-jenis surat, prosedur apa saja yang harus diperhatikan, prosedur perihal pindah memilih, dan berbagai informasi kepemiluan yang memang harus diberikan kepada para pemilih muda dalam Pilpres 2024 mendatang.

Kemudian, dominasi pemilih muda dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024 nanti perlu diperhatikan secara bijak oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum harus mampu pula untuk melakukan kerja sama dengan berbagai universitas dalam rangka melakukan sosialisasi di lingkungan kampus. KPU juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus dalam menyosialisasikan informasi Pemilu 2024 yang sedang berlangsung.



Dalam sosialisasi tersebut KPU harus mampu memberikan penyampaian pesan dan memberikan informasi kepiluan secara detail yang mudah diterima oleh para mahasiswa sebagai pemilih. KPU juga harus dapat memfasilitasi para mahasiswa yang melakukan pindah memilih pada saat nanti hari pemilihan presiden dilaksanakan.

Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan sosialisasi pemilihan presiden pada tahun 2024 nanti harus mampu memaksimalkan setiap upaya dan peluang yang ada, baik melalui cara konservatif maupun memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Dalam melakukan sosialisasi secara langsung kepada pemilih muda, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum harus mampu menarik perhatian masyarakat sekitar dan pesan yang disampaikan harus dalam bentuk yang mudah diterima sehingga para pemilih muda sebagai komunikan dapat mengerti informasi kepiluan tersebut dengan mudah. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga harus memaksimalkan berbagai media digital dalam melakukan sosialisasi kepiluan. Dalam menyampaikan sosialisasi, KPU dapat menyediakan pesan dengan berbagai visual, audio, atau bahkan menggunakan berbagai animasi yang memudahkan para pemilih muda dalam memahami pesan digital tersebut.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU juga harus menguatkan berbagai kerja sama yang telah disepakati dengan berbagai *stakeholder* dalam mendukung sosialisasi Pilpres 2024. Komisi Pemilihan Umum harus mampu menjalin kerja sama dengan berbagai media nasional bahkan hingga ke media lokal dalam melakukan sosialisasi pemilu. Dengan demikian, berbagai informasi yang akurat mengenai kepiluan dapat tersampaikan ke seluruh elemen pemilih muda dengan lebih mudah dan lebih menyeluruh.

Dalam rangkaian Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran vital dari perencanaan hingga tahap setelah pelaksanaan. Fokus utama KPU adalah melakukan sosialisasi politik, khususnya kepada pemilih muda yang mendominasi Pemilu 2024. Partisipasi aktif dari pemilih muda sangat diharapkan untuk membentuk kepemimpinan yang baru. Sosialisasi politik harus mengajarkan nilai pentingnya setiap suara dalam menentukan masa depan bangsa.

Dengan demikian, dalam menghadapi tantangan golput, KPU perlu mengevaluasi Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan meningkatkan upaya sosialisasi. Melalui RPP dan dapat memberikan edukasi politik serta memberikan penjelasan kepada para pemilih muda mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi. Meskipun program RPP telah dilaksanakan, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran pemilih muda terhadap program ini. Kemudian, pemanfaatan teknologi dan kolaborasi dengan media, baik lokal maupun nasional, menjadi kunci untuk menjangkau pemilih muda. KPU perlu menyajikan informasi kepiluan dengan cara yang menarik dan relevan, terutama melalui platform digital. Kerja sama yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk sekolah, universitas, dan media, dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih muda.

Dengan mendominasinya pemilih muda pada Pemilihan Presiden tahun 2024, KPU memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pelaksanaan sosialisasi politik kepiluan yang harus berjalan secara efektif dan menyeluruh. KPU juga harus melakukan evaluasi program, kolaborasi aktif, pemanfaatan teknologi, dan memiliki fokus lebih pada pemilih muda yang mana kalangan ini menjadi kunci penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia melalui proses pemilihan presiden yang bersih, informatif, dan partisipatif.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran yang sangat penting dalam semua tahapan pemilihan umum, mulai dari persiapan bahkan hingga setelah pelaksanaan. Pemilu 2024, terutama pemilihan presiden dan wakil presiden, sangat ditentukan oleh partisipasi pemilih muda sebagai pemilih yang memiliki hak suara yang sah. Partisipasi politik dari pemilih muda, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi kunci penting bagi keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum. Dalam menghadapi Pemilu 2024, KPU perlu memperhatikan dominasi pemilih muda dalam kategori rentang usia 17 hingga 40 tahun yang mencapai 55% dari total pemilih. Sosialisasi politik dan pendidikan politik perlu ditingkatkan untuk meningkatkan minat dan keterlibatan para pemilih muda dalam keberlangsungan pemilu. Kemudian, tingginya angka golput pada Pemilihan Presiden tahun 2019 lalu menjadi tantangan utama bagi KPU. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus berupaya meminimalisasi hal tersebut pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang dengan upaya intensif sosialisasi, terutama dengan pemanfaatan perkembangan kemampuan digitalisasi.



Dalam era digitalisasi, KPU harus memanfaatkan media digital secara maksimal dengan pembuatan konten visual yang menarik dan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat sehingga sosialisasi melalui platform digital tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi pemilu. Pemanfaatan teknologi dan media dengan konten persuasif turut menjadi kunci penting dalam menciptakan kondisi masyarakat yang melek politik. Oleh karena itu, KPU perlu mengintensifkan sosialisasi politik kepada masyarakat melalui berbagai platform, baik media tradisional maupun digital. Konten sosialisasi harus persuasif dan relevan agar dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik masyarakat.

Kemudian, dalam menyukseskan sosialisasi politik mengenai kepelembagaan KPU juga harus mampu menjalin kemitraan yang kuat dengan media lokal dan nasional juga diperlukan untuk membentuk opini positif terhadap pelaksanaan pemilu. Hal ini perlu dilakukan karena media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan memberikan informasi yang akurat terkait pemilihan umum. Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) juga perlu dievaluasi dan ditingkatkan di mana KPU harus mengambil langkah-langkah perbaikan yang harus diimplementasikan untuk meningkatkan kunjungan masyarakat dalam keberlangsungan Pemilu. Sosialisasi ke sekolah dan universitas, terutama pada pemilih muda, juga harus ditingkatkan mengingat dominasi pemilih muda dalam daftar pemilih tetap sehingga KPU harus memprioritaskan sosialisasi dan pendidikan politik yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pemilih muda dengan strategi efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dila, N., & Fitri, A. (2020). Peningkatan partisipasi pemilih milenial: Strategi komunikasi dan sosialisasi komisi pemilihan umum pada pemilu 2019. *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, dan Budaya*, 7(2), 56-84.
- Iskandar, D., & Marlina, N. (2019). Pendidikan Pemilih Muda Cerdas Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 1(1), 12-18.
- Karyaningtyas, S. (2019). Urgensi Sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 2(1).
- Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 1144.
- Nazaki, N., Handrisal, H., Adiputra, Y. S., Kustiawan, K., Winarti, N., Rahmi, K., ... & Intiham, F. (2022). Pendidikan Politik: Mahasiswa, Pemilu 2024 Dan Pemilu Yang Berkualitas. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 30-35.
- Telaumbanua, A. P., Marlon, M., & Kusmanto, H. (2021). Peran Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak. *PERSPEKTIF*, 10(2), 627-643.
- Telaumbanua, D., Laia, M. Y., Laia, R. D., & Wau, S. H. (2022). Peran pemilih muda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu. *HAGA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 115-122.
- Yusriati, Y., & Amrizal, D. (2020). Efektivitas Model Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu di Kabupaten Deli Serdang. *Warta Dharmawangsa*, 14(3), 500-507.
- Wardhani, P.S.N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/8407/9060>